

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aprilia, Bunga Mega. 2019. *Asuransi Kerangka Kapal Perikanan Sebagai Strategi Manajemen Risiko (Studi Kasus : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia)*. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol.10 No.2, November 2019, hlm.57.
- Bayuputra, Tenda Bisma. 2015. *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/April/2015, hlm.35.
- Carey, Peter dkk. 2017. *Korupsi (Dalam Silang Sejarah Indonesia, dari Daendels sampai Era Reformasi)*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chaerudin. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aditama.
- Djamali, Abdoel. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum, Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Gaung Persada Press Group.
- H, Gunanto. 1997. *Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung & Ketidakstabilan Hukum Asuransi Laut (Marine Insurance) Di Negara Kita Dewasa Ini*.
- Huda, Chairul dan Lukman Hakim. 2006. *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Khairandy, Ridwan. 2018. *Korupsi kerugian keuangan Negara di BUMN*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lamintang, P.A.F. 2006. *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parera, Agoes. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. *Good Governence dan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Saberro Inti Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sardjono, Agus. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianipar, J. Tinggi. 1990. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, Jakarta: PT. Bastela Indah Prinindo.
- Simanjuntak, Marihot. 2021. *Penyelesaian Klaim Asuransi Marine Hull and Machinery di PT Asuransi Purna Artanugraha (Sudi Kasus Putusan MA-*

RI No. 1815 K/Pdt/2015), Jurnal Hukum to-ra: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT, Issue Februari 2021. Hlm.157—169.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgerlijk Wetboek.

Suteki & Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Syah, Mudakir Iskandar. 2017. *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Tatanusa.

Syauket, Amalia. 2020. *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).

Umar, M. Hussey. 2001. *Hukum Maritim dan Maalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*. Buku I, Buku II, Buku III. Jakarta: Sinar Harapan.

Utomo, Hari. 2017. *Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.01, hlm.69.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Asuransi Nomor 40 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang RI No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang RI Nomo 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

## **C. Peraturan Pemerintah**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asurasni Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah RI No.81 /2008 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6, tahun 2020 tentang Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.

#### **D. Keputusan Presiden**

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

#### **E. Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2015 tentang Keselamatan Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 2020 tentang Kecelakaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2014 tentang Persetujuan Berlayar.

#### **F. Laman**

Ditkapel.dephub.go.id. (2020). Tentang DITKAPEL. Diakses pada 09 Januari 2021, dari <http://ditkapel.dephub.go.id/Site/Content/View/16>.

Hubla.dephub.go.id. (2020). Struktur Organisasi. Diakses pada 09 Januari 2021, dari <https://hubla.dephub.go.id/home/page/83/struktur-organisasi-1>.